

**KURIKULUM PROGRAM STUDI
MAGISTER KEBIJAKAN PENDIDIKAN**



**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, sehingga naskah akademik pendirian Program Studi Kebijakan Pendidikan Program Magister, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2020 dapat diselesaikan penyusunannya. Naskah akademik ini menjadi landasan dalam mengembangkan Program Studi Kebijakan Pendidikan Program Magister dengan kajian kebijakan pendidikan beserta kompleksitasnya. Kajian kebijakan pendidikan di dalam program studi ini di samping dapat memberi kontribusi pengembangan pemikiran teoritik kebijakan pendidikan, juga dapat memberikan dukungan bagi orientasi kebijakan untuk mengatasi persoalan-persoalan pendidikan dan persekolahan di daerah.

Kurikulum ini dikembangkan oleh Tim Kurikulum Program Studi Kebijakan Pendidikan Program Magister dengan menganalisis kebijakan dari dua sisi yakni sisi teoritik dan sisi empiris. Kurikulum Program Studi Kebijakan Pendidikan Program Magister secara teoritik disusun berdasarkan pada konfigurasi pengetahuan yang fundamental (fondasi-fondasi pendidikan) dan konfigurasi saintifik (keilmuan yang mendukungnya). Secara empiris, kurikulum disusun berdasarkan pada konfigurasi pengetahuan “*know-how*” yang vital sebagai kecakapan yang seharusnya dimiliki mahasiswa dan kajian konfigurasi isu-isu pendidikan nasional (makro), daerah (meso) dan satuan pendidikan (mikro), maupun kebijakan global.

Yogyakarta, Januari 2023

Tim Penyusun

**PROGRAM STUDI KEBIJAKAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER,
JURUSAN FILSAFAT DAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN,
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN,
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.**

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu aspek kehidupan yang tidak berada pada ruang hampa tetapi berada dalam kompleksitas konteks pendidikan. Pendidikan selalu terkait dengan aspek politik, ipteks, ekonomi, demografi, sosial budaya, situasi dan kondisi geografi bangsa. Hubungan antar aspek ini saling berkaitan secara timbal balik yang integral komprehensif. Pendidikan merupakan suatu sistem yang terbuka terhadap dinamika perubahan semua aspek tersebut di atas. Selain itu pendidikan itu juga bersifat dialogis dalam asta gatra dalam konteks ketahanan nasional (Trigatra dan Pancagatra). Oleh karena itu kebijakan pendidikan dibangun memperhatikan kompleksitas konteks pendidikan.

Kebijakan pendidikan merupakan acuan atau arah dalam pembangunan pendidikan yang kompleks tersebut. Oleh karena itu dalam pengembangan kebijakan memerlukan kajian akademis keilmuan yang melibatkan fondasi-fondasi pendidikan yang meliputi fondasi politik, ideologi, ekonomi, demografi, sosial budaya, alam, dan iptek. Selain itu dalam mengembangkan keilmuan kebijakan pendidikan sebagai kajian program studi secara esensial mendasarkan pada ideologi bangsa dan negara. Pancasila merupakan ideologi bangsa dan negara Indonesia sebagai landasan ideal yang digunakan untuk menyusun kebijakan publik termasuk kebijakan pendidikan. Ideologi Pancasila sebagai landasan ideal dijabarkan lebih rinci menjadi UUD'45 sebagai landasan konstitusional dalam pembangunan pendidikan. Dalam pembukaan UUD 1945 memuat tujuan Nasional Indonesia salah satunya tujuan Pendidikan Nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan Nasional dijabarkan juga dalam sistem politik nasional sebagai tujuan kebijakan pendidikan. Dengan demikian kebijakan pendidikan berfungsi sebagai landasan (*basic*) dan instrumen bagi pembangunan pendidikan di Indonesia. Kebijakan Pendidikan sebagai **landasan** merupakan arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan Pendidikan. Kebijakan sebagai **instrumen** maksudnya kebijakan pendidikan menjadi alat untuk mencapai tujuan nasional terwujud dalam bentuk strategi dan kegiatan mencapai tujuan nasional. Kebijakan dan strategi nasional pendidikan merupakan landasan operasional dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Penyelenggaraan pendidikan dipengaruhi oleh dinamika kebijakan. Dinamika kebijakan pendidikan tersebut tercermin dari aneka perubahan perundang-undangan pendidikan yang diimplementasikan. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia secara historis mengalami

banyak perubahan dasar kebijakan, dimulai dari munculnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah pada awal kemerdekaan sampai pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan pembaharuan kebijakan pendidikan dari waktu ke waktu membuktikan adanya keterkaitan dan relevansi antara praktik penyelenggaraan pendidikan dengan dinamika sosial politik yang mempengaruhi terbitnya kebijakan-kebijakan baru untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan.

Otonomi daerah merupakan hasil dari kebijakan negara yang terus dikuatkan eksistensinya karena mengalami proses revisi dalam perundang-undangan. Kebijakan otonomi daerah yang diawali dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan makna pengakuan kepada daerah otonom dan sekaligus pengakuan/penyerahan wewenang, hak, dan kewajiban untuk mengelola urusan pemerintahan di bidang tertentu dari Pemerintah Pusat kepada Daerah. Demikian halnya dalam pengelolaan dan pengembangan bidang pendidikan masih dalam masa transisional yakni pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik mengarah pada kebijakan pendidikan yang bersifat desentralistik.

Kebijakan pendidikan yang desentralistik telah mengatur tentang pengelolaan pendidikan dasar ke pemerintah daerah kabupaten kota dan pendidikan menengah kepada pemerintah daerah provinsi menjadikan kebijakan-kebijakan pendidikan yang ditujukan untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan di daerah yang berkualitas menjadi semakin masif. Salah satu agenda besar desentralisasi adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), di antaranya untuk perbaikan mutu dan pemerataan pendidikan. Upaya untuk menerapkan kebijakan pendidikan bermutu menyebar di seluruh daerah dan wilayah, tetapi para *policy maker* kebijakan pendidikan yang memiliki kompetensi untuk menerapkan kebijakan tersebut masih sangat terbatas sehingga berdampak pada lemahnya pengembangan kebijakan pendidikan di daerah. Demikian halnya dengan para pengambil kebijakan masih berada di dalam mentalitas sentralistik sehingga produk kebijakan pendidikan menjadi 'sentralistik lokal' mendasari konsep kebijakan pendidikan desentralistik. Selanjutnya sebagai konsekuensinya, implementasi kebijakan pendidikan dari pusat kepada kebijakan daerah masih ditemukan praktik yang tumpang tindih antara kebijakan pendidikan nasional dengan daerah. Otonomi daerah, desentralisasi merupakan salah satu isu yang mempengaruhi kebijakan

pendidikan. Sedangkan isu lainnya yaitu disfungsi kebudayaan dengan tiga simtoma yaitu adanya fragmentasi kehidupan, pola perilaku reaktif, dan kehidupan serba kompetitif.

Globalisasi berdampak pada munculnya kesenjangan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti hadirnya teknologi digital telah menyebabkan munculnya pedagogik baru dan belajar baru. Issu-issu tersebut membutuhkan penyelesaian dalam formulasi kebijakan pendidikan yang tepat agar tujuan pembangunan pendidikan dapat berjalan lebih efektif. Kajian tentang kompleksitas, desentralisasi, globalisasi dan dampaknya serta solusi dalam perspektif kebijakan pendidikan menjadi penting dalam kajian kebijakan. Hal ini yang melandasi urgensi Studi Kebijakan Pendidikan yang lebih akademis, ilmiah, komprehensif secara intensif dapat memberi kontribusi bagi pengembangan pemikiran teoritik dan empirik kebijakan pendidikan dalam Program Studi Kebijakan Pendidikan. Di samping itu juga dapat memberikan dukungan bagi orientasi kebijakan untuk mengatasi persoalan-persoalan pendidikan dan persekolahan di banyak daerah.

Pengembangan keilmuan Program Studi Kebijakan Pendidikan yang tertuang dalam kurikulum Kebijakan Pendidikan Program Magister disusun berdasarkan pada konfigurasi pengetahuan sebagai berikut:

1. Fondasi-fondasi pendidikan dalam kurikulum dimaksudkan sebagai studi tentang fakta-fakta dan prinsip-prinsip dasar yang melandasi pencarian aneka kebijakan dan praktik pendidikan yang berharga dan efektif. Prinsip-prinsip ini adalah dasar bagi dibangunnya rumah pendidikan. Dasar tersebut merupakan hal substansial yang dapat memberikan sandaran dan menjadikan struktur pendidikan itu kuat.
2. Konfigurasi keilmuan (saintifik) memberikan kontribusi landasan ilmiah bagi sebuah pengambilan kebijakan. Hal ini dirasa sangat penting dalam kebijakan pendidikan, mengingat selama ini kebijakan pendidikan lebih banyak bernuansa politis-praktis daripada perspektif ilmiah.
3. Konfigurasi pengetahuan "*know how*" penting untuk membekali mahasiswa dengan kecakapan dalam memahami dan menganalisis sebuah kebijakan.
4. Dasar konfigurasi pengetahuan tersebut adalah ideologi Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa. Konfigurasi pengetahuan yang termuat di dalam kurikulum Program Studi Kebijakan Pendidikan Program Magister ditujukan untuk membekali mahasiswa sebagai ilmuwan kebijakan pendidikan.

B. Landasan

Pengembangan keilmuan kebijakan pendidikan ke dalam program studi kebijakan pendidikan memiliki landasan filosofis, yuridis dan sosiologis. Ilmu kebijakan pendidikan memiliki akar ilmu filsafat dan sosiologi. Selain itu secara yuridis dalam mengembangkan ilmu kebijakan pendidikan memiliki landasan hukum.

Kebijakan Pendidikan sebagai kajian keilmuan berada dalam ruang global/internasional, nasional, juga berada pada ruang di daerah dan di satuan pendidikan. Dengan kata lain kebijakan pendidikan berada pada level makro, meso dan mikro. Dalam konteks ini maka dalam pengembangan Program Studi Kebijakan Pendidikan memiliki landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.

1. Landasan Filosofis

Keilmuan kebijakan Pendidikan memiliki landasan filosofis dari aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi. Secara **ontologis** kebijakan pendidikan ditujukan bagi kesejahteraan manusia. Oleh karena manusia menjadi titik pusat dalam kajian kebijakan pendidikan. Cara pandang terhadap manusia menurut Notonagoro bahwa manusia bersifat monopluralis sehingga kebijakan pendidikan merujuk pada kepentingan terpenuhinya kesejahteraan manusia yang monopluralis.

Secara **epistemologis** ilmu kebijakan pendidikan berlandaskan pada pengetahuan rasional dan empiris. Kajian ilmiah dalam bidang kebijakan pendidikan mengikuti syarat berpikir dan prosedur ilmiah yang memenuhi empat unsur, yaitu ada **objek** kajian dan perspektif ilmiah yang jelas, ada **metode** yang telah teruji dan diakui oleh komunitas ilmiah, ada **sistem pengetahuan** yang saling terkait, dan ada **sifat universalitas** atau sifat umum dari pengetahuan yang dihasilkan. Dalam konteks ilmiah, kebijakan pendidikan akan mendapatkan jalan yang tepat sebagai salah satu instrumen penting bagi mewujudkan peradaban bangsa.

Secara **aksiologis** kebijakan pendidikan bermanfaat bagi kepentingan hidup manusia dalam mencapai kesejahteraannya lahir dan batin. Sistem nilai dan norma dalam konteks Indonesia yang telah dikokohkan sebagai dasar filsafat Negara Pancasila. Falsafah negara berfungsi sebagai filsafat pendidikan nasional. Artinya, nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai pemberi pedoman dan tujuan, pemberi pendalaman, pendasar, dan perangkum berbagai sistem dan ajaran dari luar setelah diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan,

kerakyatan dan berkeadilan sebagai landasan aksiologis. Nilai-nilai moral universal menjadi landasan sekaligus tujuan pendidikan yang dijabarkan dalam kebijakan pendidikan.

Kajian kebijakan pendidikan yang memiliki ke 3 landasan filosofis dikembangkan dalam Program Studi Kebijakan Pendidikan Program Magister. Program studi ini mempunyai peran penting dalam menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia melalui kajian keilmuan dan praktik kebijakan Pendidikan. Kebijakan Pendidikan di Indonesia diantaranya telah tertuang dalam UU Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam sistem Pendidikan Nasional ini tertulis tujuan Pendidikan Nasional secara filosofis yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 UU Sisdiknas mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan Indonesia tersebut adalah gambaran dari falsafah atau pandangan hidup manusia Indonesia, secara perorangan maupun kelompok. Tujuan pendidikan berkaitan dengan sistem nilai dan norma dalam konteks kebudayaan yang di dalamnya ada kepercayaan/religi, ideologi, bahasa, sistem ekonomi dan sosial, bahasa, seni dan semua aspek kehidupan yang dipandang ideal dan baik bagi penyelenggaraan kehidupan bersama.

2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis pengembangan Program Studi Kebijakan Pendidikan Program Magister di Fakultas Ilmu Pendidikan UNY disusun berdasarkan pada konteks sosiologis bangsa Indonesia yang berada diantara bangsa-bangsa dunia dan bangsa Indonesia yang merdeka, memiliki karakteristik budaya yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa Indonesia memiliki karakteristik masyarakat pluralis dan multikultural yang terwujud dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika. Setiap daerah memiliki karakter sosial-budaya, alam, demografi, ekonomi dan politik yang semuanya menjadi landasan dalam pembangunan Pendidikan melalui kebijakan pendidikan. Kebijakan Pendidikan di Indonesia semestinya mengakomodasi kepentingan dan karakter sebagaimana keanekaragaman tersebut. Transformasi memasuki era revolusi industri 4.0 dan *society* 5.0 mempengaruhi segenap aspek dan berpengaruh pula pada perubahan struktur sosial, budaya, proses sosial, dan interaksi sosial masyarakat di berbagai institusi, termasuk di dalamnya institusi pendidikan. Oleh karena itu dalam kajian keilmuan kebijakan Pendidikan penting memperhatikan aspek perkembangan iptek.

Di samping itu pluralitas dan multikultural juga berdampak pada munculnya persoalan ketimpangan pendidikan, seperti pemerataan, akses, keadilan dan kesetaraan Pendidikan, juga ketimpangan kualitas pendidikan. Persoalan ketimpangan pendidikan di Indonesia memerlukan berbagai solusi komprehensif melalui kebijakan strategis untuk pemerataan mutu dan akses pendidikan. Perubahan dari sentralisasi menuju desentralisasi pendidikan mengisyaratkan adanya otonomi daerah dalam pengembangan pendidikan. Secara sosiologis, kebijakan pendidikan perlu berorientasi pada daya adaptasi terhadap dinamika sosial budaya dan kebutuhan masyarakatnya. Di samping itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat sangat membutuhkan respons yang proaktif bagi seluruh unsur yang terlibat, khususnya pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan dalam pengelolaan pendidikan dan persekolahan.

3. Landasan Yuridis

Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala aktivitas termasuk aktivitas Pendidikan memiliki landasan yuridis. Landasan hukum tertinggi bangsa Indonesia adalah Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warganegara berhak memperoleh pendidikan. Ayat ini menjadi landasan yuridis dalam pendirian Prodi Kebijakan Pendidikan Program Magister, landasan yuridis berikutnya adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Pasal 10 terkait dengan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan; dan pasal 11 ayat (1) mengenai kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah memberikan layanan dan kemudahan serta jaminan terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi semua warga negara. Pasal 36 terkait dengan pengembangan kurikulum (ayat 1), prinsip diversifikasi dalam pengembangan kurikulum (ayat 2), kurikulum disusun sesuai jenjang pendidikan dengan memperhatikan: peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, agama, dinamika perkembangan global, dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi: Pasal 15 ayat (1) mengatur tentang jenis pendidikan akademik; Pasal 18, 19, dan 20 tentang kewenangan program sarjana, program magister, dan program doktor; Pasal 29 menyatakan

pengertian dan peran Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagai acuan dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik.

- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi: Pasal 1 ayat 1 tentang pengertian Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ayat (5) tentang KKNI, ayat (6) tentang kurikulum, ayat (9) tentang program studi yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran; pasal 4 tentang Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran; pasal 5 mengatur tentang Standar Kompetensi Lulusan.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia: pasal 10 ayat (4) menetapkan bahwa dalam penerapan KKNI bidang kurikulum pendidikan tinggi mempunyai tugas dan fungsi masing-masing:
 - i. Setiap program studi wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaran minimal mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjang;
 - ii. Setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan kebijakan, regulasi, dan panduan tentang penyusunan kurikulum program studi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 yang menetapkan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta Pasal 24 (1) Pembukaan Program Studi di Kampus Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UNY sebagai institusi pendidikan sudah terbukti dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas dalam mendukung kebutuhan tenaga kependidikan di Indonesia. Universitas Negeri Yogyakarta menjadi rujukan dan tujuan utama untuk melanjutkan studi. Optimalisasi sumber daya manusia menjadi prasyarat penting melalui pengembangan sumber daya manusia yang profesional, berkarakter, dan dalam menghadapi revolusi industri 4.0. maupun *society* 5.0. Sumber daya yang ahli dalam pengembangan kebijakan pendidikan, baik sebagai analis, advokad, peneliti, dan evaluator kebijakan pendidikan yang bekerja secara profesional pada berbagai instansi pendidikan strategis, baik pemerintah dan swasta menjadi kebutuhan yang mendesak. Sejauh ini, belum ada perguruan tinggi di Indonesia yang menyelenggarakan Program Studi Kebijakan Pendidikan Program Magister. Dengan demikian, kehadiran Kebijakan Pendidikan Program Magister sangat diharapkan untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan pendidikan yang sangat kompleks. Sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut, pendirian program studi Kebijakan Pendidikan Program Magister di Universitas Negeri Yogyakarta menjadi urgen untuk segera dilakukan.

C. Visi dan Misi Program Studi Kebijakan Pendidikan Program Magister

Berdasarkan pada analisis terhadap latar belakang dan landasan pendirian Program Studi Kebijakan Pendidikan Program Magister maka disusun visi, misi dan profil lulusan.

1. Visi

Mengembangkan keilmuan kebijakan pendidikan berbasis pada fondasi-fondasi pendidikan dan nilai-nilai Pancasila yang menjadi rujukan nasional dengan mewujudkan sumber daya manusia unggul, kreatif, dan inovatif yang kompetitif di Asia Tenggara berlandaskan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan pada tahun 2027

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang mendidik mahasiswa menjadi pribadi yang analitis, kritis, kreatif, berintegritas, dan mempunyai kecakapan dalam mengembangkan kebijakan pendidikan, persekolahan, pembiayaan pendidikan, dan advokasi pendidikan berbasis fondasi-fondasi pendidikan yang dapat menjadi solusi masalah-masalah di masyarakat.
- b. Melakukan kajian dan penelitian yang inovatif dalam bidang kebijakan pendidikan berbasis kearifan lokal dan berwawasan global yang menjadi rujukan dalam analisis untuk kebijakan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat.

- c. Menyelenggarakan pengembangan sumber daya masyarakat pendidikan dalam meningkatkan keterampilan akademik dalam proses kebijakan pendidikan dan advokasi pendidikan.
- d. Membangun jejaring nasional dan internasional yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan berwawasan global dalam bidang kebijakan pendidikan.

D. Profil Lulusan Program Studi Kebijakan Pendidikan Program Magister

Profil lulusan Prodi Kebijakan Pendidikan Program Magister bekerja sebagai **Analisis Kebijakan Pendidikan** yang memiliki **kompetensi utama** sebagai berikut:

- a. Mampu menganalisis aspek-aspek fondasi kebijakan pendidikan: filosofis, sosiologis, politis, historis, dan ekonomis.
- b. Mampu mengkritisi konteks sosial, budaya, dan sejarah pendidikan lokal, nasional, dan global.
- c. Mampu menginterpretasi dan memformulasikan kebijakan Pendidikan Pra-sekolah, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah baik formal dan non formal pada level Nasional ke dalam konteks kebijakan daerah untuk mendukung desentralisasi.
- d. Mampu mengembangkan kebijakan pendidikan dalam konteks nasional dan daerah yang berwawasan global.
- e. Mampu memberikan asistensi kebijakan pendidikan di daerah.

Selain itu profil lulusan Kebijakan Pendidikan Program Magister juga memiliki kompetensi tambahan yang dapat dipilih dari 3 alternatif keahlian pilihan dengan kompetensi masing-masing sebagai berikut:

Tabel 1. Profil Lulusan Program Studi Kebijakan Pendidikan Program Magister

| No. | Bidang Keahlian | Kompetensi |
|-----|--|--|
| 1 | Analisis Kebijakan Pembiayaan Pendidikan | <ul style="list-style-type: none"> a. Mampu menganalisis urgensi aspek ekonomi dalam pembangunan Pendidikan nasional dan daerah b. Mampu mengembangkan kebijakan pembiayaan pendidikan di daerah. |
| 2 | Analisis Kebijakan Persekolahan | <ul style="list-style-type: none"> a. Mampu menganalisis kebijakan dan praktik belajar mengajar dan sumber daya guru. b. Mampu mengembangkan kebijakan persekolahan, guru dan pembelajaran. |
| 3 | Advokat Pendidikan | <ul style="list-style-type: none"> a. Mampu mengkritisi ketidaksetaraan pendidikan yang terkait dengan ras, kelas, gender, dan/ atau dimensi lain. b. Mampu memberikan pendampingan masalah pendidikan dan mendesakkan kepentingan pendidikan masyarakat marginal ke dalam kebijakan pendidikan. |

E. KURIKULUM

a. Keunikan dan Keunggulan Program Studi Kebijakan Pendidikan Program Magister UNY

Program Studi fokus pada kebijakan publik bidang Pendidikan yang belum mendapat perhatian secara serius pada bidang ilmu manajemen dan kebijakan publik. Keilmuan kebijakan Pendidikan berbasis pada fondasi-fondasi pendidikan dan nilai-nilai Pancasila yang hal ini tidak menjadi landasan kajian pada prodi kebijakan Pendidikan di Luar Negeri. Sehingga kebijakan pendidikan sebagai produk ilmu merupakan Kebijakan Pendidikan religius, humanis, kontekstual sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika selaras dengan semangat desentralisasi dan demokratisasi Pendidikan. Keunikan ini dalam dilihat dalam Capaian Pembelajaran dan struktur kurikulum ditunjukkan dalam mata kuliah yang disajikan.

1. Capaian Pembelajaran

Capaian pembelajaran Program Kebijakan Pendidikan Program Magister meliputi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Pengembangan capaian pembelajaran berdasarkan pada lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang KKNI 8. Capaian pembelajaran dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Capaian Pembelajaran

| No. | Capaian Pembelajaran (CP) |
|------------|---|
| I. | Aspek Sikap |
| CP 1 | Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Berakhlaq Mulia berdasarkan Pancasila |
| CP 2 | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan. |
| CP 3 | Memiliki nasionalisme dan berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban. |
| CP 4 | Taat hukum, disiplin, mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara |
| CP 5 | Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian kebijakan pendidikan secara mandiri |
| CP 6 | Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik dengan semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan |
| II. | Aspek Pengetahuan |

| No. | Capaian Pembelajaran (CP) |
|-------------|---|
| CP 7 | Memahami aspek filosofis, politik, ekonomi, sosial-budaya dan agama dalam kebijakan pendidikan dalam kebijakan pendidikan |
| CP 8 | Memahami dinamika pendidikan dalam konteks sosial, budaya, politik, dan sejarah dalam pendidikan formal, informal pada level global, nasional, dan lokal |
| CP 9 | Memahami kebijakan-kebijakan Pendidikan daerah, nasional dan global. |
| CP10 | Memahami Isu-isu kebijakan pendidikan di tingkat mikro, meso, makro, dan global |
| CP 11 | Mengenali dan menerapkan prinsip-prinsip metode dan etika penelitian dan evaluasi kebijakan. |
| CP 12 | Memahami ketidaksetaraan pendidikan yang terkait dengan ras, kelas, gender, dan/atau dimensi lain; |
| III. | Aspek Keterampilan Umum |
| CP13 | Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, yang memperhatikan serta menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dan mempublikasikan temuannya. |
| CP 14 | Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya |
| CP 15 | Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin |
| CP 16 | Mampu mengelola, mengembangkan, dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga, dan komunitas penelitian yang lebih luas; |
| CP 17 | Mampu meningkatkan kapasitas kependidikan melalui kebijakan Pendidikan. |
| IV. | Aspek Keterampilan Khusus |
| CP 18 | Mampu menganalisis data kuantitatif dan kualitatif sebagai informasi dalam pengembangan kebijakan pendidikan. |
| CP 19 | Mampu menginterpretasi kebijakan global dan nasional untuk pengembangan kebijakan pendidikan di daerah. |
| CP 20 | Mampu mengembangkan kebijakan pendidikan di daerah dan tingkat satuan pendidikan |
| CP 21 | Mampu menganalisis kebijakan pembiayaan pendidikan dan persekolahan di daerah |
| CP 22 | Mampu melakukan advokasi kebijakan pendidikan bagi masyarakat marginal |
| CP 23 | Mampu mengembangkan jaringan kerja sama untuk mengembangkan layanan asistensi pembuatan kebijakan pendidikan dan advokasi Pendidikan. |

| No. | Capaian Pembelajaran (CP) |
|-------|--|
| CP 24 | Mampu mengkomunikasikan gagasan dan kajian dengan bahasa internasional baik secara lisan, tulisan, gambar, dan media lainnya dalam berbagai forum. |

2. Struktur Kurikulum

Program Studi Magister Kebijakan dengan lulusan yang berprofesi sebagai **Analisis Kebijakan Pendidikan** dapat memilih kompetensi tambahan sebagai analis kebijakan persekolahan, analis kebijakan pembiayaan Pendidikan dan advokasi kebijakan Pendidikan dengan susunan mata kuliah per semester sebagai berikut:

Tabel 3. Struktur Kurikulum

| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot sks | | Jumlah SKS |
|------------------|--|-----------|---------|------------|
| | | Teori | Praktik | |
| Semester 1 | | | | |
| MKP8201 | Filsafat Ilmu | 2 | 0 | 2 |
| MKP8202 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 1 | 1 | 2 |
| MKP8203 | Statistik | 1 | 1 | 2 |
| MKP8204 | Fondasi-Fondasi Pendidikan dalam Kebijakan Pendidikan | 2 | 0 | 2 |
| MKP8205 | Kebijakan Pendidikan dan Administrasi Publik | 2 | 0 | 2 |
| MKP8306 | Analisis Isu-isu dan Formulasi Kebijakan Pendidikan | 2 | 1 | 3 |
| MKP8207 | Aspek ekonomi dalam Kebijakan Pendidikan | 2 | 0 | 2 |
| MKP8208 | Sekolah dan Masyarakat | 2 | 0 | 2 |
| Semester 2 | | | | |
| MKP8209 | Politik dan Kebijakan Pendidikan | 2 | 0 | 2 |
| MKP8210 | Reformasi Pendidikan: Sejarah, Kebijakan dan Praktik | 2 | 1 | 3 |
| MKP8211 | Analisis Kebijakan Pendidikan Pra Sekolah, Dasar, dan Menengah | 2 | 1 | 3 |
| MKP8212 | Evaluasi Kebijakan Pendidikan | 1 | 1 | 2 |
| MKP8213 | Sekolah sebagai Organisasi/Masyarakat *a) | 2 | 1 | 3 |
| MKP8214 | Disparitas Pendidikan*b) | 2 | 1 | 3 |
| MKP8209 | Kebijakan Pembiayaan Pendidikan antar Negara*c) | 2 | 1 | 3 |
| MKP8215 | Analisis Kebijakan Guru dan Pembelajaran*a) | 2 | 1 | 3 |

| | | | | |
|-------------|---|----|----|----|
| MKP8216 | Analisis Gerakan-gerakan Pendidikan*b) | 2 | 1 | 3 |
| MKP8217 | Analisis ekonomi Pembangunan Pendidikan*c | 2 | 1 | 3 |
| Semester 3 | | | | |
| MKP8318 | Seminar Proposal Tesis | 0 | 2 | 2 |
| MKP8619 | Tesis | 0 | 6 | 6 |
| Matrikulasi | | | | |
| MKP8620 | Ilmu Pendidikan**) | | | |
| MKP8619 | Pendidikan Komparatif**) | | | |
| MKP8619 | Proses Kebijakan**) | | | |
| | Total sks | 25 | 16 | 41 |

*) Pada mata kuliah pilihan, setiap pilihan 6 SKS, ada 3 pilihan:

*a) : Analisis Kebijakan Persekolahan

*b) : Advokad Kebijakan Pendidikan

*c) : Analisis Kebijakan Pembiayaan Pendidikan

***) Wajib bagi S1 non Kependidikan; Direkomendasikan bagi mahasiswa kependidikan.

3. Deskripsi Mata Kuliah

Tabel 4. Deskripsi Mata Kuliah

| No. | Mata Kuliah | Deskripsi |
|----------------------------------|----------------------------------|--|
| Mata Kuliah Pasca Sarjana | | |
| 1 | Filsafat Ilmu | Mata kuliah ini membahas secara selektif arti penting dan peran filsafat dalam ilmu kebijakan pendidikan dengan cakupan materi: pengertian, objek, dan cabang-cabang filsafat, pengertian ilmu, kedudukan filsafat dalam ilmu-ilmu empiris termasuk ilmu kebijakan pendidikan, landasan filsafati kebijakan pendidikan, relevansi filsafat dalam formulasi implementasi kebijakan pendidikan, dan refleksi dengan pendekatan eklektif dan komparatif untuk menjawab berbagai macam isu-isu kebijakan pendidikan yang aktual dalam praktik pendidikan di Indonesia. |
| 2 | Metodologi Penelitian Pendidikan | Mata kuliah ini mempelajari tentang konsep dasar penelitian dan evaluasi kebijakan pendidikan; jenis-jenis penelitian kebijakan; jenis-jenis evaluasi: obyek penelitian dan evaluasi kebijakan; literatur <i>review</i> dalam penelitian kebijakan pendidikan dan evaluasi; model-model evaluasi program; pendekatan dan metode penelitian dan evaluasi kebijakan: pendekatan dan metode kuantitatif dan kualitatif; dan mengembangkan rekomendasi kebijakan (<i>policy brief</i>) berbasis hasil penelitian dan evaluasi. |

| No. | Mata Kuliah | Deskripsi |
|---|---|--|
| 3 | Statistik | Mata kuliah ini membahas fungsi statistik dan data statistik dalam formulasi kebijakan pendidikan; menganalisis, menginterpretasi, dan menyimpulkan data statistik untuk informasi kebijakan; Fungsi data dalam perencanaan kebijakan pendidikan; analisis deskriptif data pendidikan; analisis prediksi; dan analisis validitas dan reliabilitas instrumen pengukuran Pendidikan. |
| Mata Kuliah Keahlian Program Studi | | |
| 4 | Fondasi-Fondasi Pendidikan dalam Kebijakan Pendidikan | Mata kuliah ini membahas tentang kompleksitas fondasi-fondasi Pendidikan yang berimplikasi pada kompleksitas fondasi dalam formulasi kebijakan Pendidikan. Fondasi Pendidikan meliputi fondasi filosofis, sosiologis, historis, politik, ekonomi, psikologis, lingkungan alam, demografis dan ilmu pengetahuan teknologis. |
| 5 | Kebijakan dan Administrasi Publik | Mata kuliah ini mengkaji dan mengeksplorasi ruang lingkup kebijakan publik, prinsip-prinsip kebijakan dan administrasi publik yang perlu dipraktikkan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan kebijakan publik yang tepat dan cita-cita <i>good governance</i> . Mata kuliah ini akan mengelaborasi secara detail mengenai ilmu dan orientasi kebijakan publik, <i>good governance</i> , <i>Old Public Administration</i> , <i>New Public Management</i> , <i>New Public Service (NPS)</i> , dimensi administrasi publik, dan inovasi pelayanan publik. Secara lebih lanjut <i>public interest</i> , <i>citizenship</i> , dan demokrasi dikaji secara lebih mendalam karena merupakan bagian dari diskursus terkini kebijakan publik dalam kerangka NPS. Berbagai perspektif tersebut perlu dipahamai agar terbangun <i>theoretical framework</i> yang komprehensif untuk memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip dalam kebijakan publik. |
| 6 | Analisis Isu-Isu dan Formulasi Kebijakan Pendidikan | Mata kuliah ini mengkaji mengenai tahapan isu dan formulasi dalam perumusan kebijakan. Tahapan isu kebijakan mengkaji secara lebih detail mengenai pengertian isu-isu kebijakan, perbedaan pengertian antara isu dan problem pendidikan, jenis-jenis isu: substantif, <i>currents issues</i> , <i>emergent trend</i> , isu pendidikan pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya, serta isu pendidikan pada tingkat daerah, nasional, dan global berdasar teori kebijakan Pendidikan. Sementara itu, formulasi kebijakan mengelaborasi mengenai prinsip-prinsip dalam merumuskan alternatif solusi dengan berbagai metode. Hal ini menjadi penting untuk dieksplorasi |

| No. | Mata Kuliah | Deskripsi |
|-----|---|---|
| | | agar mahasiswa memiliki <i>theoretical framework</i> dalam melakukan analisis kebijakan pendidikan secara tepat. |
| 7 | Aspek Ekonomi dalam Kebijakan Pendidikan | Mata kuliah Aspek Ekonomi dan Kebijakan Pendidikan membekali mahasiswa pemahaman mengenai bagaimana aspek ekonomi menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan pendidikan, problem pembangunan ekonomi dan pendidikan, serta contoh-contoh kasus yang berkaitan antara aspek ekonomi dalam praktik kebijakan pendidikan secara empiris dalam perdebatan global maupun secara kontekstual di Indonesia. |
| 8 | Sekolah dan Masyarakat | Mata kuliah ini membahas tentang struktur sosial masyarakat yang majemuk dan eksistensi peran sekolah dalam pembangunan pendidikan. Juga membahas tentang sekolah dan perubahan sosial; sekolah dan kehidupan anak; dan <i>waste in education</i> . |
| 9 | Politik dan Kebijakan Pendidikan | Mata kuliah Politik dan Kebijakan Pendidikan ini membahas teori politik dan variannya, peran dan fungsi politik dalam kebijakan pendidikan (dalam ruang lingkup; perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi), problem politik dan contoh-contoh kaitan antara politik dalam praktik kebijakan pendidikan secara empiris . Mata kuliah ini akan menekankan mahasiswa agar mampu menginterpretasikan dan menempatkan pemaknaan “politik dan nilainya” dalam sebuah koridor kajian kebijakan pendidikan. |
| 10 | Reformasi Pendidikan: Sejarah, Kebijakan, dan Praktik. | Mata kuliah Reformasi Pendidikan membahas tentang: reformasi dan komponennya, Sejarah reformasi pendidikan di Indonesia, reformasi pendidikan di Asia Tenggara dan beberapa negara lain. Kebijakan reformasi pendidikan dan praktik; profil guru Indonesia abad 21, revitalisasi pendidikan, profesi kependidikan, reformasi dalam kebijakan merdeka belajar dan budaya Indonesia, serta reformasi pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan <i>best practice</i> reformasi pendidikan. |
| 11 | Analisis Kebijakan Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar dan Menengah. | Mata kuliah ini membahas dan mengkritisi kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia dan negara-negara dunia, kebijakan tujuan-tujuan pendidikan, kebijakan sistem Pendidikan, kebijakan pengelolaan Pendidikan, kebijakan asesmen dan evaluasi, pada level Pendidikan pra sekolah, Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah. |
| 12 | Evaluasi Kebijakan Pendidikan | Mata kuliah evaluasi kebijakan Pendidikan membahas tentang keilmuan evaluasi, evaluasi kebijakan dan program, evaluasi efektifitas, |

| No. | Mata Kuliah | Deskripsi |
|--|---------------------------------------|---|
| | | efisiensi, akuntabilitas, dan sustainabilitas kebijakan Pendidikan. Juga menganalisis berbagai model evaluasi program Pendidikan, dan praktik evaluasi program Pendidikan untuk mengembangkan rekomendasi kebijakan Pendidikan di daerah. |
| 13 | Seminar Proposal Tesis | Mata kuliah seminar proposal merupakan forum ilmiah mahasiswa untuk mendiskusikan rencana penelitian di depan para ahli dan praktisi pendidikan untuk mendapatkan masukan bagi penelitiannya. |
| 14 | Tesis | Mata kuliah ini memberikan pengalaman langsung mahasiswa untuk melakukan penelitian kerja sama dengan <i>stakeholder</i> kebijakan pendidikan. Penelitian sekaligus praktik mengembangkan rekomendasi kebijakan pendidikan berbasis fondasi-fondasi pendidikan dan ilmu pengetahuan yang tertuang dalam laporan rekomendasi pendidikan. |
| Mata Kuliah Konsentrasi | | |
| Analisis Kebijakan Persekolahan | | |
| 15 | Sekolah Sebagai Organisasi/Masyarakat | Mata kuliah ini membahas tentang organisasi pendidikan, kebijakan pendidikan dan pengembangannya serta manajemen inovasi dalam pengembangan sekolah dan pendidikan dalam rangka menjadikan sekolah sebagai Lembaga yang memiliki inovasi masa depan, sehingga menjadi sekolah unggul. |
| 16 | Kebijakan Guru dan Pembelajaran | Mata kuliah ini dibagi menjadi dua bagian, pertama membahas mengenai mengajar sebagai bagian penting dari profesi guru/pendidik, lima komitmen menjadi pengajar profesional (belajar dari berbagai sumber pengetahuan, menggunakan kurikulum secara bertanggung jawab, melintasi batas-menuju kemajemukan, menemukan kebutuhan individual siswa dalam konteks kelas dan sekolah, aktif berkontribusi kepada profesi), dan kedua: membahas kebijakan guru meliputi kebijakan pendidikan yang membahas persiapan, rekrutmen, dan retensi guru, kebijakan guru sebagai bagian penting dari kebijakan pendidikan yang lebih luas (harus strategis, holistik, layak, berkelanjutan, dan peka konteks) dan contoh-contoh kebijakan guru di berbagai negara maju (Australia, Finlandia, New Zealand, USA, Belanda, Korea, Jepang, Jerman, dsb.) yang secara komparatif dibandingkan dengan kebijakan guru di Indonesia. |
| Advokasi Kebijakan Pendidikan | | |

| No. | Mata Kuliah | Deskripsi |
|---|---|--|
| 17 | Disparitas Pendidikan | Mata kuliah ini menjelaskan realitas kesenjangan pendidikan dan sumbernya dari berbagai aspek kehidupan (kelas sosial ekonomi, wilayah geografis, etnis, agama, ras, gender) serta solusi komprehensif untuk mengatasi disparitas dalam perspektif kebijakan pendidikan di berbagai negara |
| 18 | Gerakan-gerakan Pendidikan | Mata kuliah ini mengkaji landasan filosofis Gerakan Pendidikan (filsafat pendidikan kritis, latar belakangnya, nilai dan ide yang diusung), tokoh-tokoh gerakan Pendidikan beserta ide dan strategi gerakan yang diusungnya baik tingkat global, nasional, dan daerah. Konsep dan prinsip tersebut menjadi kerangka konseptual dan pisau analisis untuk mengadvokasi pendidikan di Indonesia. |
| Analisis Kebijakan Pembiayaan Pendidikan | | |
| 19 | Kebijakan Pembiayaan Pendidikan antar Negara | Mata kuliah ini merupakan mata kuliah perbandingan kebijakan pembiayaan pendidikan internasional. Kebijakan pembiayaan sangat bervariasi dari satu negara dengan negara lain, sebagai mahasiswa calon analis kebijakan pembiayaan pendidikan perlu memahami perspektif pembiayaan pendidikan global dalam rangka memperoleh keunggulan komparatif dan kompetitif secara personal maupun institusional. Materi kuliah ini akan tersusun dalam 16 sesi perkuliahan yang dijabar dari induk materi tentang <i>introduction to policy of school finance, legal issues in school finance, an framework for assessing equity and adequacy in school finance, staffing and resources for america's schools, financing educational facilities, allocation and use of the education funding, using educational resources more effectively, school district budgeting, school finance structures- formula options, and the public finance context, improving state school finance sistems, and redesigning teacher salary structure.</i> |
| 20 | Analisis Ekonomi Pembangunan Pendidikan di Daerah | Mata kuliah ini mendiskusikan aspek ekonomi dalam pembangunan pendidikan; intervensi ekonomi dalam Pendidikan dan kebijakan pendidikan; analisis kebutuhan pembiayaan Pendidikan di satuan Pendidikan; pembiayaan tenaga pendidik dan kependidikan; pembiayaan sarana dan prasarana; pembiayaan pengelolaan pendidikan; dan pengembangan kebijakan pembiayaan pendidikan di kabupaten/kota. |
| Mata Kuliah Matrikulasi | | |

| No. | Mata Kuliah | Deskripsi |
|-----|-----------------------|---|
| 21 | Ilmu Pendidikan | Mata kuliah ilmu Pendidikan ini mendiskusikan tentang konsep dasar Pendidikan; filosofi Pendidikan; teori-teori pendidikan klasik, modern dan kontemporer; komponen-komponen Pendidikan; dan permasalahan-permasalahan pendidikan dan upaya penyelesaiannya. |
| 22 | Proses Kebijakan | Mata kuliah ini mengkaji fondasi dan perspektif pendidikan dalam siklus proses kebijakan pendidikan pada tingkat global, nasional, regional, dan lokal. Fondasi dan perspektif pendidikan berfungsi untuk memberikan pertimbangan serta alternatif solusi dalam merumuskan kebijakan. Hal tersebut akan melekat pada siklus proses kebijakan yang meliputi penyusunan agenda kebijakan, Perumusan alternatif kebijakan, Pengambilan keputusan (adopsi kebijakan), <i>monitoring</i> implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Fondasi pendidikan dalam perumusan kebijakan selanjutnya akan digunakan sebagai perspektif dalam analisis untuk kebijakan pada tingkat global, nasional, dan daerah. Hal ini menjadi penting untuk dielaborasi secara lebih detail agar mahasiswa memiliki <i>theoretical framework</i> dalam melakukan analisis kebijakan pendidikan secara tepat. |
| 23 | Pendidikan Komparatif | Mata kuliah ini merupakan mata kuliah rumpun keahlian prodi dalam rangka membekali mahasiswa berupa kemampuan memahami isu, teori, dan metode perbandingan pendidikan antar bangsa dan antar negara yang dapat diperoleh manfaatnya untuk perbaikan pendidikan, sehingga mereka nantinya lulus menjadi ahli pendidikan yang handal. |